

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM
BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KOTA MEDAN

TESIS

Oleh :

HASINUDDIN
027005034/ILMU HUKUM



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2004

Hasinuddin : Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berwawasan Lingkungan Di Kota Medan, 2004

USU Repository © 2007

LAND REDISTRIBUTION OF OBJECT LANDREFORM ENVIRONMENTAL ORIENTATION IN MEDAN CITY

ABSTRACT

Hasinuddin*

Land redistribution of object land reform represent policy of government in applying desire of Section 33 sentence (3) UM 1945 and UUPA No. 5 year 1960, an effort protect farmer which don't have agriculture land and at the same time strengthen evidence ownership of its land right by giving Land right certificate. Medan city have land of object land reform more than 11 thousand hectare. As According to Decree Minister of Agraria No. SK.24/11GU/1965 of 10 June 1965 laid at spread over at some district. Medan city which metropolitan into the city also experience of matter is equal to other metropolitan cities, growth of its city expand fastly as according to its loaded function with development of urban infrastructure. To anticipate growth and growth of city at a period of the future, government of Medan city have arrangement of Medan city spatial plan 2005 which is specified pursuant of the Local Regulation No. 4 Year 1995.

Effect of policy spatial plan of this city is happened by charge of usage of land of apiculture to other usage like housing, settlement, industrial, etcetera. Though various regulation of the law both for highest to area have arranging many about prohibition order change of usage of land. Therefore to realize land redistribution of object land reform environmental orientation in Medan city, hence require to study to repeat lands of object land reform in Medan city, otherwise enable hence raising change of usage of expenditure and land of object land reform to Head of National Land Board, or by revising Medan city spatial plan which have in the Local Regulation. Referring to mentioned above hence good coordination among related institution it is true matter which is very needed to obtain advice good advice of intern and also extern.

Pursuant to breakdown of background, this research analyse raised problems, that is (1) How rule of law and regulation of land redistribution of object land reform, (2) How principle of the justice of land redistribution of object land reform environmental-oriented, and (3) How to policy of land redistribution of object land reform environmental-oriented in Medan city.

This research aim to for the : (1) of its stocktaking of law and regulation of land redistribution of object land reform, (2) Knowing principle of justice of redistribution land of object land reform environmental-oriented, and (3) Knowing policy of land redistribution of object land reform.

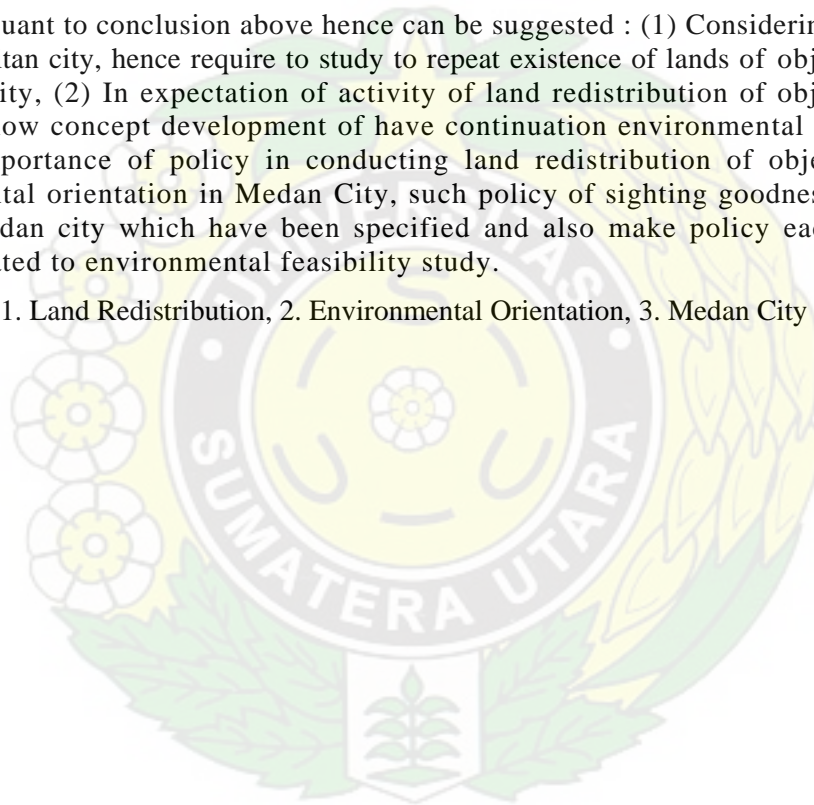
*PNS in BPN Study Learn at Program Pascasarjana USU Medan

Pursuant to utilized research method that is research of normative, hence data analysis performed within solution and research is document study and bibliography, by conducting and gathering of editing for its stocktaking of law and regulation of land redistribution of object land reform, hereinafter from various the law and regulation studied and read well and real correct to get real meaning of the law and regulation to get dogmatism punish or philosophic meaning which is mirror in principles of justice of redistribution land environmental orientation. Which policy of land redistribution of object land reform environmental-orientation in Medan city writer discover with research of field with informant side from the Land Office of Medan city and regional office of National Land Board province North Sumatra.

From result of solution and research hence obtained: (1) That uncommitting of law and regulation of land redistribution of object land reform better, (2) Not yet all principle of justice of registration land of object land reform environmental-orientation can be executed, and (3) Creation braid not yet co-ordinate between related institution in applying and also making policy specially in execution of land redistribution of object land reform environmental orientation.

Pursuant to conclusion above hence can be suggested : (1) Considering of Medan City to Metropolitan city, hence require to study to repeat existence of lands of object land reform in Medan city, (2) In expectation of activity of land redistribution of object land reform have to follow concept development of have continuation environmental orientation, and (3) The importance of policy in conducting land redistribution of object land reform environmental orientation in Medan City, such policy of sighting goodness return Spatial Plan of Medan city which have been specified and also make policy each development have to related to environmental feasibility study.

Key Words: 1. Land Redistribution, 2. Environmental Orientation, 3. Medan City



REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM
BERWAWASAN LINGKUNGAN
DI KOTA MEDAN

INTISARI

Hasinuddin*

Redistribusi tanah obyek landreform merupakan kebijakan pemerintah dalam menerapkan kehendak dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA No. 5 tahun 1960, suatu usaha melindungi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian dan sekaligus memperkuat bukti pemilikan hak atas tanahnya dengan memberikan sertipikat Hak Atas Tanah. Kota Medan mempunyai tanah obyek landreform lebih dari 11 ribu Ha. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No.Sk.24/1-1GU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang letaknya tersebar pada beberapa kecamatan. Kota Medan yang menuju Kota Metropolitan juga mengalami hal sama dengan kota-kota metropolitan lainnya, pertumbuhan kotanya berkembang secara pesat sesuai dengan fungsinya yang sarat dengan pengembangan prasarana perkotaan. Untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kota pada masamasa yang akan datang, pemerintah Kota Medan telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Kota Medan 2005 yang ditetapkan berdasarkan Perda No. 4 Tahun 1995.

Akibat kebijakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini terjadilah perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke penggunaan lain seperti perumahan, permukiman, industri, dan sebagainya. Pada hal berbagai peraturan perundang-undangan baik yang tertinggi sampai ke daerah telah banyak mengatur tentang larangan perubahan penggunaan tanah. Oleh karena itu untuk mewujudkan redistribusi tanah obyek landreform yang berwawasan lingkungan di Kota Medan, maka perlu dikaji ulang tentang tanah-tanah obyek landreform di Kota Medan, jika tidak memungkinkan maka ajukan perubahan penggunaan tanah dan pengeluaran dari obyek landreform ke Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau dengan meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yang telah di Perdakan itu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka koordinasi yang baik antara instansi yang terkait memang hal yang sangat diperlukan untuk memperoleh masukan (*advice*) baik *advice* interen maupun eksteren.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini akan menganalisis permasalahan yang diajukan. Secara rinci permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan redistribusi tanah obyek landreform, (2) Bagaimana asas hukum redistribusi tanah obyek landreform berwawasan lingkungan dan yang ke (3) Bagaimana kebijakan redistribusi tanah obyek landreform berwawasan lingkungan di Kota Medan.

*PNS di Lingslangan BPN Tugas Belajar pada Program Pascasarjana USU Medan

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Terinventarisasinya peraturan perundangundangan redistribusi tanah obyek landreform, (2) Mengetahui asas hukum redistribusi tanah obyek landreform berwawasan lingkungan dan ke (3) Mengetahui kebijakan redistribusi tanah obyek landreform berwawasan lingkungan di Kota Medan.

Berdasarkan metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian normatif, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian dan pembahasan adalah studi dokumen dan kepustakaan, dengan melakukan pengumpulan dan editing untuk terinventarisasinya peraturan perundang-undangan redistribusi tanah obyek landreform, selanjutnya dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dipelajari dan dibaca secara baik dan benar untuk mendapatkan makna hakiki dari peraturan perundang-undangan tersebut untuk mendapatkan dogmatisme hukum atau makna filosofis yang tercennin dalam asas hokum redistribusi tanah berwawasan lingkungan. Sedangkan kebijakan redistribusi tanah obyek landreform berwawasan lingkungan di kota Medan penulis dapati dengan penelitian lapangan dengan pihak informan dari Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara.

Dan hasil penelitian dan pembahasan maka di peroleh kesimpulan: (1) Bahwa belum terlaksananya peraturan perundang-undangan redistribusi tanah obyek landreform dengan baik, (2) Belum semua sasas hukum redistribusi tanah obyek landreform berwawasan lingkungan dapat dilaksanakan, dan (3) Belum terciptanya jalinan koordinasi antar instansi yang terkait dalam menerapkan maupun membuat kebijakan khususnya dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landrefonn berwawasan lingkungan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan: (1) Mengingat Kota Medan menuju Kota metropolitan, maka perlu dikaji ulang keberadaan tanah-tanah obyek landreform di Kota Medan, (2) Agar dalam kegiatan redistribusi tanah obyek landreform hams diperhatikan dilaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan (3) Perlunya kebijakan dalam melakukan redistribusi tanah obyek landreform berwawasan lingkungan di Kota Medan, kebijakan dimaksud baik peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yang telah ditetapkan maupun membuat kebijakan setiap pembangunan hams mengacu kepada studi kelayakan lingkungan.

Kata Kunci: 1. Redistribusi tanah, 2. Berwawasan lingkungan, 3. Kota Medan